



## **BAB II**

### **PERSPEKTIF TEORITIK**

#### **(Kajian Kepustakaan Dan Konseptual)**

#### **A. Kajian Tentang Remaja**

##### **1. Remaja Dalam Perspektif Umum**

Sejalan dengan perjalanan hidupnya, manusia melalui berbagai jenjang kehidupan, yang dimulai sejak kelahiran hingga kematian. di mulai dengan masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu setengah baya dan menjadi tua. Menurut pakar psikologi masa remaja adalah masa peralihan yang di tempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa atau dapat di katakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.

Selanjutnya dalam buku dasar-dasar pembinaan pendidikan pengembangan generasi muda, disebutkan bahwa dalam pengertian secara umum generasi muda adalah golongan manusia yang berusia muda, yang jika dilihat :<sup>20</sup>

- a. Dari segi biologis berusia 15-30 tahun
- b. Dari segi budaya dan fungsional berusia 13 – 18, 21 tahun
- c. Dari segi angkatan kerja berusia 18 -22 tahun

---

<sup>20</sup> Muhammad Syarif Ash-Shawwaf, ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), h. 227



- d. Dari segi psikologi dan budaya, maka pematangan pribadi ditentukan pada usia 17 -39 tahun
- e. Dari segi idiologi, politik, maka generasi muda adalah calon penerus dalam hal ini berumur 17 – 39 tahun.

Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 12-21 tahun. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, yaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami berbagai perubahan yang drastis, termasuk perubahan jasmani, sosial, emosi, dan bahasa. Akibat daripada itu, orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil, dan sentiasa "bermasalah".<sup>21</sup>

Tat-kala manusia remaja suka bergaul dengan rekan sebaya daripada ibu dan bapak mereka. Pada peringkat ini, manusia remaja akan mulai belajar bergaul dengan orang lain selain daripada ahli anggota keluarga mereka. Ini bermaksud bahawa peringkat remaja merupakan peringkat perkembangan sosial seseorang. Sehubungan dengan itu, orang remaja adalah suka berkawan dan senang tersinggung oleh masalah sosial. Di samping itu mereka juga suka berangan-angan, remaja yang normal mempunyai angan-angan sehat mengenai masa depan mereka. Mereka sentiasa memikirkan apa yang akan mereka buat pada masa yang akan datang. Mereka juga senang terpengaruh oleh emosi, seorang remaja merupakan orang yang senang terpengaruh oleh

---

<sup>21</sup> M. Jakfar Puteh, *Dakwah di Era Globalisasi Strategi Menghadapi Perubahan Sosial*, (Jakarta: A.K. Group, 2006), hal. 62



emosi. Ini adalah kerana rasional mereka masih berkembang dan belum sampai ke satu tahap yang mantap.

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya remaja adalah waktu seorang manusia berumur belasan tahun. Pada masa itu manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi juga tidak dapat pula disebut anak-anak. Karena masa remaja adalah masa transisi, dimana seorang manusia mengalami peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan biasanya emosi seseorang sangat labil pada usia-usia remaja seperti ini.

## **2. Remaja Dalam Perspektif WHO**

Remaja adalah sesuatu masa dimana :

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri.

Namun WHO juga menetapkan usia 10-20 tahun termasuk remaja perempuan yang rawan, karena kehamilan dalam usia-usia tersebut mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya. Sedangkan Penetapan umur tersebut diberlakukan juga pada laki-laki



dalam 2 kategori : remaja awal (10-14 tahun) dan remaja akhir (15-20 tahun).<sup>22</sup>

### 3. Remaja Dalam Perspektif Agama

Dalam bahasa arab “*ghulam*” adalah remaja, dimana seseorang dalam usia ini bisa dikatakan “*mumayyiz*” yang berarti bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Adapun ciri-ciri remaja dalam segi agama (khususnya islam) yaitu : terdapat benjolan besar pada daerah dada, dan perubahan fisik yang drastis terjadi pada remaja perempuan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada remaja laki-laki yaitu dengan adanya perubahan suara yang makin besar volumenya, perubahan fisik, dan yang membedakan dengan remaja perempuan yaitu terjadinya mimpi basah ”(imajinasasi tingkat tinggi dalam alam bawah sadar yang mengakibatkan ejakulasi dan mengeluarkan air mani pada saat bermimpi, dan mengharuskan pelaku untuk bersesuci dengan cara mandi besar atau janabat)”.<sup>23</sup>

## B. PEMBERDAYAAN

### 1. Definisi Pemberdayaan

Secara kajian konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Remaja, <http://mentoringku.wordpress.com/2/> diakses pada tanggal 20 januari pukul 15.00 WIB

<sup>23</sup> Pengertian mandi besar dalam kitab fathul qarib dalam acara tutorial yang diadakan oleh pondok pesantren tebuireng jombang dengan nara sumber zaenul arifin 43 tahun.

<sup>24</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005). Hal. 57



Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain.

Dalam hal ini, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.<sup>25</sup>

Dalam istilah lain dijelaskan pula bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya,

---

<sup>25</sup> Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara, 2005). Hal. 169



memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.<sup>26</sup>

Jadi pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Beberapa ahli juga mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, antara lain:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama,2010). Hal. 59-60



- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.<sup>27</sup>

Menurut Sunyoto Usman dalam bukunya Abu Huraerah menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim yang disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Menurut Kartasasmita, memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan atau memandirikan masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut David C. Korten, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang *esensial* dan *fundamental* menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 58-59

<sup>28</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 100-101

dan kesempatan untuk bekerja secara *fair*, serta tentu saja aktualisasi spiritual.<sup>29</sup>

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, dan masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.<sup>30</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Pelaksanaan pendekatan diatas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Salomon (1976) dkk, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, diantaranya:

---

<sup>29</sup> Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara, 2005). Hal. 5

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 60



- a. Pemberdayaan adalah proses kolaborasi. Karena pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai *partner*.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.



- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.<sup>31</sup>

#### 4. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti meningkatkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat saja dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*Empowerment setting*) yaitu:

- a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling (*stress management intervention*). Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

- b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 68-69



keterampilan dari sikap-sikap klien, agar memiliki kemampuan memecah permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat. Manajemen konflik adalah beberapa strategi besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>32</sup>

Secara umum, ada 4 strategi pemberdayaan masyarakat, diantara lain meliputi :<sup>33</sup>

1. *The growth strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, pemodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 66

<sup>33</sup> Moh. Ali Azis, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2005). Hal. 8



## 2. *The responsive strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need assistance*) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Tetapi karena pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) sendiri belum dilakukan, maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit untuk ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan kecepatan teknologi seringkali bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

## 3. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultural dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Karena itulah dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah persoalan kultur dan budaya masyarakat.



#### 4. *The integrated or holistic strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti hal di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik.

Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Karena itulah dalam strategi ini terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan, keadilan pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara *eksplisit* harus ada strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus:
  - a) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
  - b) Intervensi dilakukan untuk memperoleh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Serta untuk mengambil langkah instrumental yang membutuhkan kemampuan aparatur untuk melakukan intervensi sosial.
- 2) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan melakukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya, tercapainya tujuan strategi holistik tersebut, yaitu untuk:



- a) Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strategi
  - b) Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh “*Institusional leadership*”.
- 3) Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supra organisasi yang berfungsi antara lain:
- a) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh
  - b) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pimpinan kelembagaan.
  - c) Membantu mekanisme kontrol untuk saling mengatur keterkaitan antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategi. Untuk menjaga prinsip tersebut, maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan semua masyarakat yang berkompeten dan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

## **5. Model-Model Pemberdayaan**

Dalam hal ini menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan tiga model yang berbunga dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

### **a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif



anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

#### b. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain.

Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok- kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana sosial dipandang sebagai ahli (*expert*) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

#### c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamentalis dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of dicisi making*) pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur.



Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).<sup>34</sup>

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi obyek berubah menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subyek dengan subyek yang lain. Samuel Paul misalnya, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan

---

<sup>34</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 37



untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Suatu diskursus pemberdayaan akan selalu dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktifitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi.

Kieffer mendeskripsikan secara kongkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu : “kelompok – kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang – orang yang mengalami ketidakberdayaan.”<sup>35</sup>

Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai *deviant* atau menyimpang, kurang dihargai, dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor struktural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek – aspek kehidupan tertentu.

Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya aspek politik, lemahnya akses

---

<sup>35</sup> Fami Idris, *Peremberdayaan Sebagai Tinjauan Teoritis* (<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis/>, diakses Jum'at 18 Mei 2012)

informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah kepada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, yaitu:

*a. Enabling*

Yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat struktural dan kultural yang menghambat.

*b. Empowering*

Yakni penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

*c. Protecting*

Yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya

eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

*d. Supporting*

Yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

*e. Fostering*

Yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuatan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.<sup>36</sup>

## **6. Dakwah Pemberdayaan**

Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa arab “*da’a, yad’u, da’watan*” yang berarti ajakan, seruan, undangan, panggilan.<sup>37</sup>

Sedangkan secara terminologi sesuai dengan firman Allah SWT surat Ali Imron ayat 104, yang berbunyi:

---

<sup>36</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 67

<sup>37</sup> Husaen Segaf, dkk, *Pedoman Pembinaan Dakwah Bil Hal*, (Dirjen Bimas Islam san Urusan Haji Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1997), hal. 7



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>38</sup>

Dakwah juga dapat diartikan perbaikan dan pembangunan masyarakat (*ishlah*)<sup>39</sup> yang meliputi:

- Melaksanakan amanah Allah SWT yang meliputi amanah ibadah dan khilafah
- Menegakkan yang *ma'ruf* dan memberantas kemungkaran (*Al-Munkar*)
- Al-Ma'ruf wan nahyu anil munkar
- Merubah situasi kepada situasi yang lebih baik
- Perbaikan dan pembangunan masyarakat
- Merealisasikan ajaran agama islam dalam segenap aspek hidup dan kehidupan manusia

Dakwah sebagai agen perubahan (*agent of change*) mempunyai arti yang luas, yaitu mengubah manusia kearah yang lebih baik untuk memberikan pengaruh perubahan pada tingkah laku manusia sesuai yang dikehendaki dakwah. Oleh karena itu komponen dakwah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia perlu dikembangkan.

---

<sup>38</sup> Department agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)hal 79.

<sup>39</sup> A. Sudarji, Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal 28



Menurut A. Suryadi yang dikutip oleh Yahya Mansur, dakwah pemberdayaan masyarakat adalah aplikasi dan fungsi manusia di dunia untuk beribadah dan mengelola bumi seisinya perlu dikembangkan.<sup>40</sup>

### C. Teori Pendampingan

Dikalangan dunia pengembangan masyarakat, istilah “pendampingan” merupakan istilah baru yang muncul sekitar tahun 1990-an. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.<sup>41</sup>

Kesan lain yang muncul adalah pembinaan sebagai pihak yang aktif sedang yang dibina pasif atau pembinaan adalah subjek, sedangkan yang dibina adalah objek. Oleh karena itu istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran, yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadilah proses

---

<sup>40</sup> Yahya Mansur, *Dakwah Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994), hal 18

<sup>41</sup> Riski Aditya, *Pengertian Teori Pendampingan* (<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pendampingan.html>, diakses, Senin 14 Mei 2012)



perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik.

Selama ini, jika orang – orang berbicara soal pendampingan, mereka menandainya dalam dua kutub yang saling bertentangan, yakni : pendampingan otokratis (bersifat serba mengarahkan dan memerintahkan) di satu sisi, dan pendampingan demokratis (bersifat mendorong dan mendukung). Pendampingan otokratis didasarkan pada kedudukan pemilikan kekuasaan dan kewenangan, sementara pendampingan lebih dikaitkan dengan kekuatan pribadi dan peran serta anggota yang dipimpin dalam proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Sedangkan perilaku pendamping ada dua yakni mengarahkan dan mendorong. Perilaku mengarahkan atau *Directive Behaviour* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pendamping dalam bentuk komunikasi satu arah : menjelaskan peran masyarakat dan memerintahkan kepada masyarakat apa yang mesti mereka kerjakan, dimana mereka harus mengerjakannya, kapan, dan bagaimana caranya serta melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan dan hasil kerja masyarakat tersebut.

Perilaku mendorong atau *Supportive Behaviour*, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang pendamping dalam bentuk komunikasi dua arah, lebih banyak mendengarkan saran dan pendapat masyarakat, memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat, memperlancar dan mempermudah terjadinya hubungan antar setiap orang, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.



#### **D. Teori Advokasi**

Dalam pemberdayaan remaja dibutuhkan perlindungan agar dapat terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi. Salah satu perlindungan tersebut adalah advokasi. Advokasi adalah upaya terencana dan terorganisir untuk mendesakkan perubahan dengan cara mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya saat mereka mengambil keputusan dalam menetapkan peraturan perundang – undangan mengatur sumber daya, dan mengambil kebijakan menyangkut masyarakat (atau dikenal dengan sebutan : kebijakan publik). Titik beratnya adalah pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu perubahan kebijakan menyangkut kepentingan kita sebagai masyarakat.<sup>42</sup>

Ada yang berpendapat bahwa advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.<sup>43</sup>

Advokasi sendiri terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Dengan kata lain, advokasi kebijakan sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses – proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan

---

<sup>42</sup> Valentina Sagala, *Advokasi Perempuan Akar Rumput*, (Bandung : Institut Perempuan. 2011), hlm. 3

<sup>43</sup> Sheila Espine, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, (Jakarta : Ameerpro.2004), hlm. 28



melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan – kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.<sup>44</sup>

Edi Suharto dalam makalahnya “Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006, menulis bahwa istilah advokasi sangat lekat dengan pembelaan. Karenanya tidak heran jika advokasi seringkali diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan di pengadilan”. Dalam bahasa Inggris *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).<sup>45</sup>

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu :

#### 1. Advokasi Kasus

Adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Dengan alasan : terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama klien individu. Karenanya, advokasi sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

---

<sup>44</sup> Roem Topatimasang, *Merubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000), hlm. 29

<sup>45</sup> Ruli Hasan, *Sekilas Tentang Teori Advokasi* (<http://www.pusaka-community.org/2010/01/sekilas-tentang-teori-advokasi6241.html>, diakses pada Senin 14 Mei 2012)



## 2. Advokasi Kelas

Advokasi kelas melibatkan proses – proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan – keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian ini, penulis mencari referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “LSM Prakarsa Dan Upaya Pemberdayaan Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)” karangan Sri Winarni.

Dalam skripsi ini fokus yang dikaji adalah proses pemberdayaan yang dilakukan LSM Prakarsa dalam memberdayakan petani di desa Sumurgenuk. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana strategi pengorganisasian yang dilakukan oleh LSM SeBAYA dalam meningkatkan kapasitas remaja.



2. Skripsi yang berjudul “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPMAA Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Tentang Pemberdayaan Agen Pengembang Masyarakat Oleh LSM SPMAA Di Turi Lamongan)” karangan Khoirul Anwar.

Dalam skripsi ini focus kajiannya adalah melihat proses Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPMAA dalam membentuk agen pengembang masyarakat. Dan bagaimana relevansinya dengan dakwah pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin tahu bagaimana program yang dilakukan oleh LSM SeBAYA untuk meningkatkan kapasitas remaja di Surabaya.

3. Skripsi yang berjudul “Upaya LSM Spektra Dalam Mengentas Kemiskinan (Studi Tentang Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Grobongan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)” karangan Mahira Yuyani Abika.

Dalam skripsi ini fokus penelitian ditujukan pada bagaimana upaya LSM Spektra dalam mengentas kemiskinan melalui pelaksanaan program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gerdu-Taskin) di Desa Grobongan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan program yang dilakukan oleh LSM SeBAYA-PKBI Jawa Timur ini sudah tepat dalam proses pemberdayaan remaja.